p-ISSN : 2301-7775
e-ISSN : 2579-8014
NIAGAWAN Vol 7 No 3 November 2018

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT-OBATAN ILEGAL SECARA ONLINE

Leli Juwanti[1)*], Marta Tilov[2)]
[1)] Ekonomi, Universitas Negeri Medan
Email: lelijuwanti96@gmail.com
[2)] Ekonomi, Universitas Negeri Medan
Email: martatilova320@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan mengenai penjualan obat-obatan ilegal secara online. Salah satu obat ilegal yang dijual secara online adalah obat diet ABC Acai Berry. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan obat-obatan ilegal secara online ini belum seutuhnya diterapkan baik dalam UU Perlindungan konsumen, UU pangan, UU ITE dan UU kesehatan, khususnya dalam hal penerapan hak hak konsumen. Beberapa tahun terakhir ini, banyak diberitakan di beberapa situs berita online bahwa terjadi penjualan obat-obatan ilegal dan palsu secara online oleh beberapa situs penjualan online. Penjualan obat ilegal secara online ini semakin marak terjadi khususnya di Indonesia. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang pertama dengan mendengarkan aspirasi atau keberatan yang disampaikan oleh masyarakat atas penjualan obat ilegal secara online sehingga dapat terbentuk peraturan mengenai permasalahan tersebut sesuai dengan hak-hak yang dimiliki masyarakat sebagai konsumen. Jika peraturan tersebut tidak diterapkan, baik oleh masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha, maka perlindungan hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah mengenai permasalahan ini yaitu dilakukannya penegakan hukum melalui peradilan umum di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Obat ilegal, Online.

PENDAHULUAN

Kegiatan jual beli secara online atau yang disebut dengan E-commerce merupakan suatu kegiatan transaksi yang menggunakan media elektronik sebagai alat penghubungnya antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga kesepakatan atau perjanjian yang tercipta adalah melalui online. Namun, dengan adanya kegiatan jual beli yang dilakukan secara online dengan menggunakan media transaksi elektronik maka sering terjadi kesalahpahaman antara pelaku usaha dengan konsumen. Salah satu contoh barang yang banyak diperjual belikan secara online adalah makanan dan obat-obatan. Beberapa tahun terakhir ini, banyak diberitakan di beberapa situs berita online bahwa terjadi penjualan obat-obatan ilegal dan palsu secara online oleh beberapa situs penjualan online. Penjualan obat ilegal secara online ini semakin marak terjadi khususnya di Indonesia.

Salah satu contoh obat ilegal yang banyak dijual secara online ini adalah obat pelangsing atau penurun berat badan. Dari banyaknya jenis obat pelangsing yang dijual di internet penulis mengambil salah satu contoh yaitu obat pelangsing dengan merek Acai berry. Acai berry merupakan obat pelangsing yang berbentuk pil dijual dalam kemasan botol yang menurut informasi bisa menurunkan berat badan hingga beberapa kilo. Tetapi, obat acai berry ini sayangnya tidak terdaftar atau ter registrasi dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga obat acai berry ini dapat digolongkan menjadi obat ilegal. Kejelasan informasi atas obat-obatan yang dijual secara online sangat penting untuk masyarakat atau konsumen, karena sangat berpengaruh bagi kesehatan dan keselamatan hidup mereka.

Lemahnya kedudukan konsumen atas kegiatan jual beli yang dilakukan secara online dibandingkan pihak produsen, maka perlindungan hukum terhadap para konsumen dirasa sangat perlu khususnya dalam masalah penjualan obat-obatan ilegal yang dijual secara online. Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen cukup luas, sehingga banyak peraturan hukum lainnya yang masih berkesinambungan dengan UUPK.

Dengan semakin berkembangnya bisnis jual beli online, maka UUITE juga mengatur dan menjelaskan mengenai hak-hak konsumen, tetapi dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara pasal-perpasal melainkan hanya sekedar hak-hak konsumen secara umum. Begitu juga dengan Undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009, kesehatan sangat penting bagi semua manusia di dunia. Jika terjadi penjualan obat-obatan ilegal dan banyak yang mengkonsumsi obat tersebut maka diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi obat-obatan ilegal. Dalam permasalahan ini undang-undang pangan nomor 36 tahun 2009 juga dapat dihubungkan, walaupun obat tidak termasuk dalam pangan namun apabila obat tersebut mengandung senyawa kimia yang berhubungan dengan nabati atau yang dijelaskan dalam pengertian maka pembahasan ini bisa dikaitkan dengan undang-undang pangan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan obat-obatan ilegal secara online menurut hukum positif di Indonesia, diantaranya Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang Pangan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan obat-obatan ilegal secara online menurut hukum positif di Indonesia, diantaranya Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Kesehatan dan Undang-undang Pangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli online tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara online sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronis memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini Bagaimana Perlindungan Hukum

terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-obatan Ilegal ABC Acai berry secara Online menurut Hukum Positif di Indonesia yaitu UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pangan dan UU Kesehatan dan juga bentuk perlindungan hukumnya menurut UU yang berkaitan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan yang menggunakan perundang-undangan (UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Kesehatan dan UU Pangan) dimana dari undang-undang tersebut akan diteliti berbagai aturan atau ketentuan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi Kepustakaan, Penelusuran Internet dan Dokumentasi hukum, dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode analasis interpretasi gramatikal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan yang menggunakan perundang-undangan (UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Kesehatan dan UU Pangan) dimana dari undang-undang tersebut akan diteliti berbagai aturan atau ketentuan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi Kepustakaan, Penelusuran Internet dan Dokumentasi hukum, dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode analasis interpretasi gramatikal.

Penjualan Obat-obatan Ilegal secara Online di Indonesia

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Penjualan obat-obatan saat ini perlu sedikit diperhatikan, karena obat-obatan yang secara bebas diperdagangkan di masyarakat sudah dapat diakses atau dibeli melalui media online, tidak hanya melalui apotek dengan menggunakan resep dokter. Penjualan secara online ini dilakukan para pelaku usaha sebagai akses untuk menjual obat-obatan kepada masyarakat tanpa harus bertemu atau berintekraksi secara langsung kepada pembelinya. Obat-obatan yang dijual secara online melalui beberapa situs penjualan online berbagai macam jenisnya, mulai dari obat-obatan yang mempunyai fungsi untuk menyembuhkan penyakit umum, penyakit keras, obat diet, maupun obat yang jenisnya suplemen bagi tubuh.

Jenis obat yang akan menjadi dasar penelitian penulis yaitu obat diet. Obat diet bermacam-macam jenis dan mereknya, salah satu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah obat Acai berry. Acai berry merupakan obat diet yang mempunyai beberapa khasiat bagi tubuh manusia, salah satunya adalah untuk menahan nafsu makan dan menurunkan berat badan. Dari banyaknya merek obat Acai berry yang beredar di pasaran, salah satu merek acai berry yang diragukan izin edarnya adalah ABC Acai berry. Izin edar yang terdapat pada obat-obatan, makanan atau kosmetik dapat dilihat pada website Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Setelah penulis melakukan pencarian dari daftar registrasi yang terdapat dalam website BPOM, obat acai berry bermerek ABC acai berry ini tidak terdaftar di dalam BPOM, sehingga obat diet ini dapat digolongkan dalam kategori obat ilegal karena tidak memiliki izin edar dan tidak teregistrasi dalam BPOM. Ilegal menurut kamus hukum politik & hukum adalah Ilegal atau tidak legal (berlawanan dengan undang-undang); tidak menurut hukum; tidak sah, adalah pengertian ilegal menurut kamus umum politik dan hukum.

Kegiatan jual beli secara online atau yang biasa disebut dengan E-commerce saat ini telah banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, e- commerce telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. Lemahnya kedudukan konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha, maka sangat diperlukan perlindungan hukum yang ditujukan bagi konsumen khususnya dalam penjualan obat-

obatan ilegal yang dijual secara online. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Kesehatan dan juga Undang-undang Pangan.

Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di Indonesia sendiri telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4843. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai pegertian transaksi elektornik, yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 bahwa Transaksi Elektornik adalah "Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Penyebaran informasi yang dilakukan pelaku usaha dalam menjualakan barangnya khususnya obat-obatan dilakukan melalui beberapa situs online dan juga beberapa media sosial, contohnya seperti facebook, instagram dan juga media sosial lainnya yang diakses melalui komputer.

Pasal 9 UU ITE menjelaskan mengenai informasi dari pelaku usaha mengenai barang yang dijual bahwa, Pelaku usaha menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Kelengkapan informasi yang diberikan kepada konsumen harus sesuai dengan yang seharusnya, baik mengenai kandugan yang terdapat pada obat-obatan tersebut, izin edar dari obat tersebut, bentuk dari obat-obatan, hingga khasiat dan efek samping bagi pengguna apabila mengkonsumsi obat diet ABC acai berry, dan kelengkapan informasi ini merupakan suatu hal yang terpenting dalam kegiatan jual beli. Namun, kenyataannya masih banyak beberapa pelaku usaha yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya mengenai obat diet ABC Acai berry, contohnya seperti izin edar obat ABC acai berry, atau pelaku usaha tidak menjelaskan mengenai efek samping dari penggunaan obat ini selain untuk menurunkan berat badan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang dibentuk pemerintah guna memberi ketentuan-ketentuan dalam kegiatan e-commerce, dijelaskan dalam bab V mengenai transaksi elektronik yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dalam transaksi elektronik. Selain UUITE, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dimana dalam peraturan ini terdapat penjelasan tambahan mengenai transaksi elektornik yang lebih jelas dan lengkap dalam pasal 49. Dan dalam peraturan ini juga terdapat penjelasan mengenai layanan pengaduan yang dijelaskan dalam pasal 51 ayat 1

Asas-asas yang terdapat pada penjelasan pasal 3 UUITE, yaitu 1) Asas Kepastian Hukum, 2) Asas manfaat, 3) Asas Kehati-hatian, 4) Asas Itikad baik, 5) Asas Kebebasan memilih teknologi atau netral teknoogi. Namun demikian, penerapan asas-asas yang terdapat dalam UUITE ini belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku usaha khususnya dalam penjualan obat diet ABC Acai berry. Pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut yaitu para pihak yang melakukan transaksi seperti yang dijelaskan dalam pasal 21 ayat a bahwa "Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi". Dari penjelasan tersebut bisa terlihat bahwa kedudukan konsumen sangat lemah dalam permasalahan penjualan obat diet ABC Acai berry dimana konsumen tidak mengetahui kebenaran akan obat diet tersebut, baik kandungan, komposisi atau izin edar sehingga konsumen tidak dapat menuntut pelaku usaha yang menjual obat-obatan tersebut.

Dalam undang-undang ITE belum dijelaskan secara jelas mengenai hak-hak konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik seperti penjelasan mengenai hak-hak konsumen yang ada dalam UUPK, sehingga dalam penjualan obat-obatan ilegal khususnya obat diet ABC Acai Berry masih harus disesuaikan dengan UUITE baik mengenai hak konsumen maupun ketentuan dalam kegiatan transaksi elektronik.

Menurut Undang-undang Kesehatan

Kesehatan merupakan hak bagi setiap manusia. Sebagai salah satu aset terpenting dalam hidup manusia, maka pengawasan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan dunia kesehatan merupakan hal penting bagi

pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Penjualan obat-obatan ilegal khususnya obat diet yang bermerek ABC Acai berry ini tentu telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang kesehatan, karena Obat diet ABC Acai berry tidak terdaftar dalam daftar registrasi yang terdapat dalam website BPOM.

Dijelaskan dalam pasal 106 ayat (1) Undang-undang Kesehatan bahwa "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar", artinya obat acai berry bermerek ABC Acai berry termasuk dalam kategori obat ilegal karena tidak memiliki izin edar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga obat-obatan yang dijual baik secara online maupun yang beredar luas di pasaran harus memenuhi syarat farmakope Indonesia dan juga syarat-syarat lainnya sesuai pasal 105 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi "Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya".

Dalam UU Kesehatan Perlindungan hukum yang dijelaskana adalah dalam bentuk upaya kesahatan. Upaya kesehatan sendiri dijelaskaan dalam pasal 1 angka 11 bahwa Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Artinya dalam memebentuk masyarakat yang sehat dan sejahtera maka perlulah peran pemerintah dalam mencegah, meningkatkan kesehatan dan perlindungan kesehatan.

Pasal 98 ayat (2) yang berbunyi Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dalam praktenya pelaku usaha yang menjual obat ilegal khususnya obat diet ABC Acai berry tidak memiliki kewenangan untuk menjual obat tersebut, karena obat yang dijual tidak mempunyai izin edar dari BPOM. Dalam UU Kesehatan yang dijelaskan dalam pasal 106 ayat (2) yang berbunyi, Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 106 ayat (2) tersebut tidak menjelasakan mengenai sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, peraturan yang dijelaskan hanya mengenai sediaan farmasi yang memiliki izin edar untuk dapat ditarik dari peredaran apabila tidak memenuhi persyaratan.

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen

Dalam UUPK pelaku usaha diminta untuk jujur atas segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang diperjualkan kepada konsumen. Khususnya dalam penjualan obat diet ilegal, keterangan mengenai obat diet ABC Acai berry ini telah memiliki izin edar seharusnya tidak ditulis oleh pelaku usaha, dikarenakan obat ini belum memeiliki izin edar. Dalam penjualan obat diet ABC Acai berry sangat disayangkan pada prakteknya tidak sesuai dengan tujuan undang-undang perlindungan konsumen yang dijelaskan dalam pasal 3, khususnya dalam hal keterbukaan informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen dan juga sikap yang jujur dan bertangguungjawab.

Hak-hak konsumen yang perlu diperhatikan dalam transaksi e-commerce, yaitu, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Di masyarakat penjualan obat-obatan yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan perundang-undang masih banyak terjadi khususnya dalam penjualan melalui kegiatan e-commerce, penjelasan ini juga bisa dihubungan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3). Penjelasan pasal 8 ayat (3) diatas mengatur mengenai penjualan dan peredaran sediaan farmasi harus memberikan informasi secara lengkap dan benar, tetapi dalam peraturan ini tidak dijelaskan mengenai perdagngan yang dilakukan dengan menggunakan E-commerce. Sedangkan masyarakat sebagai konsumen mempunyai hak-hak nya tersendiri sebagai pengguna barang dna jasa dalam hal ini adalah obat diet ABC acai berry yang dijual secara online.

Ketentuan mengenai kegiatan jual beli atau E-commerce dalam UUPK sendiri belum diatur. Dalam UUPK pengaturan mengenai kegiatan jual beli adalah kegiatan jual beli secara umum bukan dalam hal kegiatan jual beli secara online. Dengan ini pemerintah perlu menyikapi dan mengawasi kegiatan jual beli yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen melalui media online atau menggunakan transaksi elektronik. Hal ini disebabkan kegiatan e-commerce mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kegiatan jual beli yang dilakukan secara umum. Dalam hal perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha masih banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan penjualan obat diet ABC Acai berry dan juga ketidaksesuaian penjualan obat diet ABC Acai berry ini dengan hak-hak konsumen yang telah ditaur dalam UUPK.

Menurut Undang-undang Pangan

Pasal 1 angka 1 UU Pangan menjelaskan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Obat ABC Acai berry ini dapat dikategorikan sebagai pangan karena memiliki komposisi obat yang berasal dari hasil pertanian dan perkebunan.

Tabel 1

Kandungan obat	Omega 6, Omega 9, Fosfor, Kalsium, Vitamin B1, Vitamin B2, dll.
Komposisi obat	Pure Buah Acai Berry, Aloe, Chitosan, Garcinia Camboga, Dietary Fiber, Green Tea.

Sumber: http://clinic-herbal.com/obat-pelangsing-badan-abc-acaiberry/

Dalam undang-undang ini terdapat beberapa kewajiban bagi setiap orang yang mengedarkan pangan, salah satunya adalah menjamin keamanan pangan dan keselamatan manusia. Dalam undang-undang Pangan informasi yang diberikan dalam pangan yang dijual dan diedarkan disebut dengan pemberian label pangan. Label pangan disini dimaksud sebagai informasi yang diberikan dalam pangan yang dijual. Pemberian label dalam pangan yang djual dan diedarkan tidak boleh menyesatkan dan tidak boleh bertentangan dengan yang sebenarnya, contohnya seperti keterangan kandungan dan komposisi yang ada dalam pangan tersebut. Ketidak sesuaian praktek penjualan obat diet ABC Acai berry dengan UU Pangan terlihat dari penjelasan mengenai informasi yang tertera pada pangan atau dalam UU ini disebut label, karena informasi yang tertera dalam label sesungguhnya tidak sesuai dengan kandungan yang ada dalam obat tersebut.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-obatan Ilegal secara Online

Masalah konsumen merupakan masalah semua orang, dengan demikian masalah konsumen merupakan masalah nasional yang harus diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah. Tujuan penyelenggaran, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Namun, masih banyak konsumen yang belum mengerti tentang hukum, dan juga hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Perlindungan konsumen ini juga bertujuan untuk memberikan hukuman (Punishment) bagi setiap pelanggaran yang terjadi yang berhubungan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUPK.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemeritah dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif menurut penulis belum seutuhnya dilaksanakan, Preventif yang berarti kesempatan untuk masyarakat memberikan keberatannya diharapakan lebih bisa diterapkan oleh pemerintah. Pendapat yang diberikan masyarakat dapat membatu pemeritah untuk membentuk perlindungan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam permasalahan yang penulis angkat dalam jurnal ini, masyarakat sebagai konsumen perlu menyampaikan keberatannya dalam hal penjualan obat ilegal secara online, karena kegiatan ini sangat membahayakan khususnya bagi konsumen yang mengkonsumsi obat ilegal

khususnya obat diet ABC Acai Berry. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya membahas mengenai kegiatan e-commerce khususnya dalam UUPK, keberatan yang diberikan masyarakat dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk membuat peraturan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif, pemerintah juga melakukan perlindungan hukum yang bersifat represif dalam bentuk penegakan hukum bagi setiap orang yang dinyatakan bersalah. Apabila konsumen merasa dirinya dirugikan oleh pelaku usaha dalam kegiatan jual beli online maka konsumen dapat mengadukannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan pasal 49 UUPK, dimana lembaga ini merupakan lembaga penyelesaian sengketa diluar peradilan, sehingga penyelesaian sengketa non litigasi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif dari pemerintah. Dari pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan sudah dilakukan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dan juga pengawasan dengan memblokir beberapa situs penjualan obat ilegal, hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal yang sangat penting, sehingga pengaturan dalam beberapa undang-undang tersebut perlu dianalisi lebih lanjut oleh pemerintah guna memperkuat pengaturan mengenai perlindungan konsumen khususnya dalam kegiatan penjualan obat-obatan ilegal atau yang tidak memiliki izin edar khususnya obat diet ABC Acai berry yang dijual secara online di beberapa situs penjualan online.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Obat diet bermerek ABC Acai berry yang tidak terdafartar dalam Badan Registrasi Obat dan Makanan telah melanggar beberapa ketentuan baik yang ada dalam UUPK mengenai hak-hak konsumen yang harus dipenuhi dalam pasal 4, dan juga perbuatan yang dilanggar pelaku usaha mengenai sediaan farmasi pada pasal 8 ayat 3. Dalam UU ITE penjualan obat diet ABC Acai berry ini melanggar ketentuan dalam pasal 9 mengenai kelengkapan informasi mengenai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Penjualan obat-obatan ini juga melanggar peraturan mengenai izin edar sediaan farmasi dalam UU Kesehatan pasal 106 ayat 1 dan juga dalam UU Pangan dalam pasal 89 mengenai perbuatan yang dilarang dalam memperjualkan dan memproduksi pangan.

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang pertama dengan mendengarkan aspirasi atau keberatan yang disampaikan oleh masyarakat atas penjualan obat ilegal secara online sehingga dapat terbentuk peraturan mengenai permasalahan tersebut sesuai dengan hak-hak yang dimiliki masyarakat sebagai konsumen. Jika peraturan tersebut tidak diterapkan, baik oleh masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha, maka perlindungan hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah mengenai permasalahan ini yaitu dilakukannya penegakan hukum melalui peradilan umum di Indonesia.

Saran

Bagi Masyarakat agar lebih memperhatikan dan teliti dalam membaca dan mencari informasi yang disediakan oleh para pelaku usaha mengenai obat-obatan yang dijual secara online, dan juga dapat lebih mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibuat agar tidak terjadi kerugian maupun sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha.

Bagi para Pelaku usaha penting untuk memperhatikan hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, dan juga perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, sehingga tidak terjadi lagi penjualan obat-obatan ilegal yang tidak terdaftar atau teregistrasi di BPOM, secara online.

Bagi Pemerintah atau Aparat Penegak Hukum agar lebih teliti dalam mengawasi kegiatan penjualan obat-obatan ilegal yang dijual secara online yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga dapat menerapkan ketentuan-ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Kesehatan sehingga dapat tercipta perlindungan hukum yang ditujukan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

REFERENSI

Bagus Hanindyo Mantri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce,2007, Universitas Diponegoro, Semarang,2014

Mulya Nurbilkis, BPOM: 302 Situs Internet Menjual Obat Palsu, http://news.detik.com/read/2014/05/26/164027/2592732/10/bpom-302-situs-internet-menjual-obat-palsu, DetikNews,2014.

------ Jual Beli Obat Ilegal Makin Marak di Internet (Kompas.com), http://www.stopobatpalsu.com/index.php?modul=search&textid=306775404326 (online),2014.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4843)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-belanja-online

http://aldibrother.blogspot.com/2013/05/pentingnya-hukum-perlindungan-konsumen.html

http://jurnal.unhalu.ac.id/download/jabal/PERLINDUNGAN%20KONSUMEN%20DALAM%20TRANSAKSI%20ELOKTRONIK.pdf

http://clinic-herbal.com/obat-pelangsing-badan-abc-acaiberry/